

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PEMANFAAT TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Anggita Nur Setyarini ^{1*}, Sri Ambarwati ², Nelyumna ³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

Email : nelyumna@univpancasila.ac.id

Diterima 15 September 2023, Disetujui 26 September 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang. Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel adalah *purposive sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 orang dengan jumlah 39 OPD. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara metode survei melalui penggunaan kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 27. Hasil pengujian menyatakan bahwa: (1) Terdapat pengaruh antara penerapan standar akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang. (2) Terdapat pengaruh antara sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang. (3) Tidak terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang.

Kata Kunci : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintah.

Abstract

This study aims to test whether there is an effect of applying government accounting standards, internal control systems, and the use of information technology on the quality of the financial reports of the local government of Serang City. The technique used in determining the sample is purposive sampling. The number of samples in this study were 80 people with a total of 39 OPD. The type of data used in this research is primary data. And data collection used in research is by survey method using a questionnaire. The analytical method used is multiple linear regression analysis using the SPSS version 27 program. The test results state that: (1) There is an influence between the application of government accounting standards and the quality of the financial reports of the local government of Serang City. (2) There is an influence between the internal control system and the quality of the financial reports of the regional government of Serang City. (3) There is no effect of the use of information technology on the quality of the financial reports of the regional government of Serang City.

Keywords : *Government Accounting Standards, Internal Control Systems, Quality of Government Financial Reports, Utilization of Information Technology.*

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, akuntabilitas menjadi bentuk pertanggungjawaban dan menjadi sebuah keharusan bagi lembaga pemerintahan. Selain itu, tuntutan masyarakat akan pemberlakuan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government and governance*) semakin meningkat. Hal tersebut mengharuskan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah adalah dengan cara menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupalaporan keuangan.

Laporan keuangan adalah sarana bagi sebuah entitas maupun pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Menurut Wardiningdyah (2022), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Begitu juga dalam lingkup keuangan pemerintahan yang wajib menyajikan laporan keuangan atas dana yang diperoleh. Laporan keuangan dalam lingkup pemerintahan, diatur secara jelas berdasarkan aturan atau ketentuan hukum. Prinsip penyajian laporan keuangan pemerintahan sama dengan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan akuntansi, yang membedakan adalah komponen dan struktur laporan keuangannya. Tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam hal menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang ada serta pengambilan keputusan (SAP Nomor 71 Tahun 2010). Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 1 dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintahan harus disusun dengan menerapkan basis akrual dalam pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban atau sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP, 2018).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010, merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Tujuan dari pelaksanaan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelaporan keuangan. Untuk mengetahui kualitas akuntabilitas laporan keuangan negara dan daerah, diperlukan penilaian yang dilakukan oleh lembaga negara yang kompeten. Dalam menyusun laporan keuangan diperlukan karakteristik kualitatif sebagai bentuk kualitas laporan keuangan. Karakteristik kualitatif meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya akan mendapatkan Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Jika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Artinya, pemerintah dapat mempertahankan capaian opini audit terbaik atas laporan keuangan tersebut selama enam tahun berturut-turut, dimulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. BPK memberikan opini WTP atas LKPP Tahun 2021 dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Opini tersebut didasarkan opini WTP atas 83 LKKL (Laporan Keuangan Kementerian Lembaga) dan 1 LKBUN (Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara) yang berpengaruh signifikan terhadap LKPP 2021. Selain pemerintahan pusat, pemerintahan daerah pun memperoleh hal yang sama sebagai contoh Kota Serang yang juga mampu menyusun laporan keuangan yang baik dengan memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak sepuluh kali berturut-turut. Selama 7 tahun terakhir, Kota Serang mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, Kota Serang masih memperoleh predikat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), namun pada tahun 2017 sampai dengan 2021, berhasil mencapai dan mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Meskipun laporan keuangan pemerintahan pusat dan daerah sudah dikatakan baik dan memperoleh opini WTP, masih banyak terjadi kasus kecurangan dalam pelaporan keuangan. Pada pemerintahan pusat maupun daerah, kasus korupsi masih marak terjadi. Hal tersebut bisa terjadi karena masih ditemukannya kelemahan sistem pengendalian internal. Selain itu, juga pada fasilitas yang telah diberikan pemerintah untuk membantu dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, di beberapa daerah masih belum digunakan secara maksimal. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan undang-undang dan peraturan yang diberlakukan dalam penyusunan laporan keuangan dan juga kurangnya pemahaman pegawai pemerintahan dalam menggunakan teknologi informasi yang telah disediakan pemerintah.

Standar yang ditetapkan oleh BPK tahun 2016, dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis akrual disusun oleh masing-masing pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara transparan dan akuntabel, dan memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan, baik pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga wajib diterapkan agar dapat melaporkan segala upaya yang ada dan memaparkan hasil yang sudah dicapai oleh suatu entitas pelaporan dalam pelaksanaannya yang terstruktur serta sistematis dalam suatu periode pelaporan untuk kepentingan transparansi, akuntabilitas, manajemen, keseimbangan antar generasi, serta evaluasi kerja.

Dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, suatu instansi membutuhkan sistem pengendalian internal yang kuat. Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral

pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, pemerintah mulai menggunakan sistem komputer dan mulai meninggalkan sistem manual. Pemanfaatan teknologi informasi ini dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan suatu entitas. Pemerintah telah mengatur pemanfaatan teknologi informasi ini dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 Tahun 2005 pasal 13 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Teknologi informasi merupakan pilihan utama untuk menciptakan sistem informasi suatu entitas yang tangguh dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat saat ini. Pemanfaatan teknologi informasi berupa penggunaan komputer dan jaringan internetnya dalam kegiatan pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang berkualitas. Kesalahan bisa diminimalkan, dan laporan keuangan dapat disajikan lebih cepat, andal, dan akurat.

Hasil penelitian dari Rohman, Ismaya, dan Lestari (2020) menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang baik bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan *output* lainnya lebih tepat waktu. Pada pengendalian internal, semakin tinggi tingkat penerapan sistem pengendalian internal, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada komitmen organisasi, semakin tinggi komitmen organisasi, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu apakah terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara empiris mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

KAJIAN TEORI

Teori Agen (*Agency Theory*)

Teori keagenan atau *agency theory* menurut Supriyono (2018) merupakan suatu konsep yang menggambarkan hubungan antara pemberi kontrak (*principal*) dan penerima kontrak (*agent*), prinsipal mengontrak agen untuk dapat bekerja demi kepentingan serta tujuan dari prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Hubungan teori agensi dengan akuntabilitas pelaporan keuangan, yaitu pemerintah yang bertindak

sebagai *agent* mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah atau masyarakat yang bertindak sebagai *principal*. Pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab memberikan informasi yang transparan dan akuntabel melalui kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah dan penyajian laporan sewajar mungkin. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan.

Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Brigham dan Houston (2015) memberikan gambaran bahwa sinyal atau isyarat merupakan suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Menurut Hartono (2018), informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika informasi mengandung nilai positif, diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar.

Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Teori stakeholder dalam Ghozali dan Chariri (2007) dinyatakan bahwa perusahaan bukan merupakan entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan, namun juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* (pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, analis, karyawan, pemerintah, dan pihak lain seperti masyarakat yang merupakan bagian dari lingkungan sosial). Teori *stakeholder* berkaitan dengan upaya yang dilakukan perusahaan dalam menjaga hubungan baik dengan *stakeholder* tersebut supaya mereka memiliki kepercayaan terhadap entitas, salah satu untuk meningkatkan kepercayaan adalah dengan mempublikasikan laporan keuangan kepada publik. Entitas yang ditunjukkan pada penelitian ini adalah pemerintah yang harus menyajikan laporan keuangan berkualitas sehingga bermanfaat bagi *stakeholder* dalam pengambilan keputusan.

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 1 tahun 2018, laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan arus kas entitas. Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi para pemakai apabila tersedia tepat waktu sebelum pemakai kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Menurut Ihsanti (2014), suatu laporan keuangan dapat dikatakan baik atau berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan dapat memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Dalam standar akuntansi yang ditetapkan

pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Keuangan pemerintah adalah persyaratan normatif untuk laporan keuangan pemerintah agar dapat memenuhi karakteristik yang diinginkan. Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 terdapat beberapa butir karakteristik kualitatif yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna maupun dapat dikatakan berkualitas, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Ferryono, dkk. (2017) menjelaskan bahwa standar akuntansi pemerintah bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah serta menggabungkan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Penerapan standar akuntansi pemerintah akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini berarti informasi laporan keuangan pemerintah akan menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dan diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Standar Akuntansi Pemerintah merupakan penerapan berbagai prinsip akuntansi yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada laporan keuangan pemerintahan (pusat dan daerah). Oleh karena itu, Standar Akuntansi Pemerintah menjadi syarat wajib bagi pemerintahan pusat dan daerah yang kemudian diberikan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk daerah.

Semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah maka akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan karena standar akuntansi pemerintahan yang digunakan merupakan aturan yang harus diterapkan di laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chaniago (2020), Ardianto (2019) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

H1: Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2016:129) meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan kendala data, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan diterapkannya sistem pengendalian internal yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penggelapan laporan keuangan dan dapat membuat rekomendasi untuk mengurangi dan menghindari kejadian tersebut, yang tersusun dari *internal control framework* yang di dalamnya terdapat definisi umum untuk pengendalian internal, standar, dan kriteria pengendalian internal yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai sistem pengendalian yang telah mereka buat.

Sistem pengendalian internal dikatakan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena dengan diterapkannya sistem pengendalian internal maka pemerintah daerah akan memiliki otorisasi

pemisahan tugas yang jelas. Tidak ada pegawai pemerintahan yang merangkap fungsi dalam penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut karena menjadi faktor terbesar adanya tindakan-tindakan yang kurang etis dari pegawai pemerintahan yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Jika sudah ada otorisasi pemisahan tugas yang jelas maka setiap fungsi-fungsi dapat dijalankan dengan baik. Informasi-informasi yang dilaporkan akan lebih akurat sehingga dapat meminimalkan tindakan-tindakan tidak etis yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, Mustika, dan Eka (2018), serta Chaniago (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, serta menyimpan data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan serta merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. Tujuan teknologi informasi adalah menyelesaikan masalah, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Dengan adanya teknologi informasi membuat manusia lebih mudah dan efisien dalam bekerja.

Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal akan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardianto (2019) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H3: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

METODE

Penelitian ini mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang dengan menggunakan jenis data primer. Populasi pegawai pengelola keuangan merupakan 39 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Serang. Teknik pengambilan sampel menggunakan pendekatan *purposive sampling* dengan jumlah sampel akhir 80 orang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner

Pada penelitian ini variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi merupakan variabel bebas (*independen*). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang merupakan variabel terikat (*dependen*). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji *F*, Uji *t*, dan Koefisien Determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

<i>Variabel</i>	<i>N</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Kualitas Laporan Keuangan Daerah	80	40	50	44.75	3.336
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	80	34	50	45.86	4.093
Sistem pengendalian Internal	80	31	50	45.99	4.169
Pemanfaatan Teknologi Informasi	80	31	50	45.24	3.969

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2023.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pengamatan sudah sesuai dengan kriteria sampel penelitian, yaitu sebanyak 80 sampel pada 39 Organisasi Perangkat daerah (OPD) Kota Serang.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
	Coefficients ^a				
(Constant)	15.476	2.704		5.724	.001
PSAP	.232	.097	.324	2.391	.019
SPI	.309	.092	.403	3.376	.001
PTI	.094	.079	.127	1.192	.237

a. Dependent Variable: KUALITAS LKPD

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS, 2023.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda menunjukkan bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dapat dimasukkan dalam persamaan sebagai berikut :

$$Y = 15,476 + 0,232 \text{ PSAP} + 0,309 \text{ SPI} + 0,094 \text{ PTI} + e$$

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.49132196
Most Extreme Differences	Absolute	.045
	Positive	.039
	Negative	-.045
Test Statistic		.045
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS, 2023.

Berdasarkan tabel 3, hasil uji normalitas dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Tolerance	VIF
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0,401	2,492
Sistem Pengendalian Internal	0,420	2,383
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,657	1,522

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS, 2023.

Berdasarkan tabel 4, hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,100, demikian pula dengan nilai VIF masing-masing variabel yang lebih kecil dari 10,00. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas antar variabel independen dalam penelitian ini.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.850	2.843		1.003	.319
SAP	-.060	.055	-.163	-1.081	.283
SPI	-.007	.070	-.016	-.104	.918
TI	.049	.061	.107	.810	.421

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS, 2023.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikan pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada variabel independen dalam penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b			
R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.788 ^a	.620	.605	2.540

a. Predictors: (Constant), PTI, SPI, SAP
b. Dependent Variable: KUALITAS LKPD

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS, 2023.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan hasil *Adjusted R-squared* sebesar 0,605 atau sebesar 60,5% yang berarti bahwa variasi dari kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel bebas, yaitu variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi, sedangkan sisanya sebesar 39,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

2. Uji F

Tabel 7. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	388.672	3	129.557	20.081	.000 ^b
Residual	490.328	76	6.452		
Total	879.000	79			

a. Dependent Variable: KUALITAS LKPD

b. Predictors: (Constant), PTI, SPI, SAP

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS, 2023.

Berdasarkan hasil uji *F* menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti bahwa model regresi layak atau dapat digunakan untuk memprediksi kualitas laporan keuangan dan dapat dilanjutkan untuk pengujian hipotesis.

3. Uji t

Tabel 8. Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a			<i>t</i>	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	<i>B</i>	Std. Error	Beta		
(Constant)	15.476	2.704		5.724	.001
PSAP	.232	.097	.324	2.391	.019
SPI	.309	.092	.403	3.376	.001
PTI	.094	.079	.127	1.192	.237

a. Dependent Variable: KUALITAS LKPD

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS, 2023.

Berdasarkan hasil uji *t* menunjukkan bahwa :

- 1) Penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,019, lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sehingga hipotesis pertama (H1) diterima.
- 2) Sistem pengendalian internal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001, lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sehingga hipotesis kedua (H2) diterima.
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,237, lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak.

Pembahasan

1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,019 yang berarti nilai signifikansi X_1 lebih kecil dari 0,05 yang berarti dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya terdapat pengaruh antara penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Semakin baik standar akuntansi pemerintahan yang diterapkan maka semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan tersebut karena standar akuntansi pemerintahan yang digunakan merupakan aturan-aturan yang harus diterapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Implementasi SAP sangat diperlukan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan APBN dan APBD berupa laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pedoman dalam penyajian laporan

keuangan pemerintah. Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pengelolaan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohman, Ismaya, dan Lestari (2020) yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Kota Serang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti nilai signifikansi X^2 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa H_2 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kota Serang. Semakin baik pengawasan, pemisahan tugas yang jelas, pendelegasian wewenang, dokumentasi atas transaksi yang lengkap dan sah, pencatatan yang akurat dan tepat waktu serta melakukan pengujian sistem pengendalian internal yang sudah ada, maka semakin baik juga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chaniago (2020) dan Rohman, Ismaya, dan Lestari (2020) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, nilai koefisien regresi menunjukkan nilai positif sehingga dapat diartikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,237 yang berarti nilai signifikansi X^3 lebih besar dari 0,05 yang berarti dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi Kota Serang tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kota Serang karena dalam proses pengelolaan keuangan atau akuntansi hingga pembuatan laporan keuangan Kota Serang masih belum semua terkomputerisasi atau masih ada yang dilakukan secara manual. Walaupun komputer yang dimiliki sudah cukup banyak dan tersambung dengan jaringan internet, akan tetapi untuk proses pengiriman informasi dan komunikasi para pegawai masih belum bisa memanfaatkan fasilitas dengan maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi yang canggih tidak akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang akurat dan baik apabila sumber daya manusia yang ada tidak dapat mengoptimalkan kemampuan teknologi tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan

oleh Aritonang (2019) dan juga penelitian dari Dewi, Mendra, Saitri (2022) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang. Namun demikian, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang.

Saran

Terdapat beberapa hal yang disarankan, yaitu bagi seluruh dinas Kota Serang agar mengikutsertakan pegawai pada pendidikan dan pelatihan (diklat) mengenai bagaimana penyusunan laporan keuangan berkualitas yang berlaku umum dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang diatur dalam PP No. 71 tahun 2010 serta memberikan penghargaan atau *reward* terhadap pegawai apabila pegawai memiliki kinerja yang memuaskan agar pegawai senantiasa memiliki komitmen dan loyalitas terhadap instansi pemerintah. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Serang sehingga dapat dibandingkan dengan hasil penelitian ini. Peneliti selanjutnya juga perlu memperluas atau memperbanyak responden atau objek yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Admaja, D. D. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap terciptanya Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung*.
- Amin W. T. (2013). *The Fraud Audit: Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan Akuntansi*. Jakarta: Harvarindo
- Ardianto, R. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Bina Akuntansi, Vol. 6 No. 1*.
- Aritonang, M. B. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila*
- Baries Ferryono, dkk. (2017). Manfaat Akuntansi Basis AkruaI dan Akuntansi Basis Kas Menuju AkruaI dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Volume 4, No. 1, h. 143-160*.
- Boynton, W.C., Johnson, R.N., & Kell, G.W. (2003). *Modern Auditing*. (edisi 7). Jakarta: Erlangga.
- BPK RI. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang*. 5 November 2022. <https://banten.bpk.go.id/kota-serang/>

- Chaniago, F. M. (2020). Pengaruh Penerepan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila*
- Chasbiandani, T., Rafrini Amyulianthy, & Anisa May. (2022). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DBH, DAU, DAK TERHADAP BELANJA MODAL. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)*, 2(1), 1-18.
- Dadang Suwanda (2015). *Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah Berpedoman SAP Berbasis Akrual*. Jakarta: PPM Manajemen.
- Dew, N. P. R. F., Mendra, N. P. Y., & Saitri, P. W. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar VOL. 4 No. 1*
- Fauziyah, E. M. (2019). "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi". *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tirtayasa Vol. 04 No. 02*
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19 Edisi Kelima*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ihsanti, Emilda. (2014). "Pengaruh Kompetensi SDM dan Penerapan SAKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Universitas Negeri Padang*.
- Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1: Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: IAI
- Kementrian Keuangan RI. (2021). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2021*. 7 November 2022. Djpb.kemenkeu.go.id.
- Komarasari, W. (2016). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan). *E-Jurnal Universitas PGRI Yogyakarta. Yogyakarta*.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mandagie, Y., Lailah Fujianti, & Nadiyah Afifah. (2022). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN SUSTAINABLE REPORTING (Studi Empiris Pada Perusahaan Peraih Indonesia Sustainability Reporting Award Yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2015- 2019). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)*, 2(1), 19-34.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Nurul Indah Kurniasari, Ambarwati, S., & Gumilarsih Andamari, B. (2023). PENGARUH STRUKTUR ASET, STRUKTUR MODAL DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)*, 3(1), 1-15.
- Rahayu, S., & Kanita, A. D. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom Vol. 10 No. 2*
- Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *E-Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi, Vol 20, No 2*.
- Rohman, A., Ismaya, A., & Lestari, T. (2020). Peran Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, dan Komitmen Organisasi dalam meningkatkan

- Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Vol. 5 No. 2*
- Sari, L. A. N. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga*.
- Scott, R. William. (2015). *Financial Accounting Theory*. Seventh Edition. Pearson Prentice Hall: Toronto.
- Selviani, M., Fredy, H., & Shinta Budi Astuti. (2022). PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)*, 2(2), 95-106.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Ternalemta, Kalangi, L., & Tinangon, J. J. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Vol. 12 No. 1*
- Triwardana, Dhedy. 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Kampar. *E-Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Vol. 4, No. 1*.
- Wikiapbn. (2015). *Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan*. 12 November 2022. https://www.wikiapbn.org/prinsip-akuntansi-dan-pelaporan-keuangan/#Realisasi_Realization
- Yuvianita, M., Ahmar, N., & Mandagie, Y. (2022). PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)*, 2(2), 138-150.